



Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok

LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Triwulan I



20 26

081 857 999 7

bpbl.lombok@gmail.com

KATA PENGANTAR

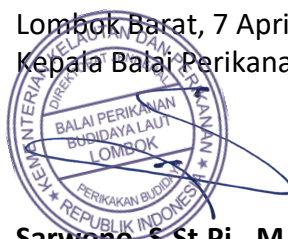
Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dianggap belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan media sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk memperbaiki pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna layanan.

Pendekatan yang digunakan selama ini dalam upaya perbaikan pelayanan hanya berdasarkan kepada pemerintah sebagai penyedia layanan semata-mata, belum dipadukan dengan keinginan masyarakat sebagai pengguna layanan. Atas pemikiran tersebut, maka Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya melaksanakan penilaian terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat dengan melakukan SKM melalui *stakeholder* yang telah mendapatkan pelayanan. Melalui hasil survei ini, diharapkan dapat menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya dan meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan semua pihak yang telah banyak membantu hingga tersusunnya Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I Tahun 2026. Akhirnya harapan kami agar laporan ini dapat bermanfaat dalam mendukung proses percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik pada Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

Lombok Barat, 7 April 2026

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok



Sarwono, S.St.Pi., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
BAB II PENGUKURAN DATA SKM.....	4
2.1 Pelaksana SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data.....	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden.....	6
BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	7
3.1 Jumlah Responden SKM	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat.....	8
BAB IV ANALISIS HASIL SKM	11
4.1 Analisa Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Tiap Unsur Layanan.....	11
4.2 Rencana Tindak Lanjut	11
4.3 Tren Nilai SKM.....	12
BAB V HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA	13
BAB VI KESIMPULAN.....	166
LAMPIRAN	177

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Responden SK	7
Tabel 2. Kategorisasi Mutu Pelayanan	8
Tabel 3. Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 9 (sembilan) Unsur Pelayanan	9
Tabel 4. Nilai IKM Triwulan I Tahun 2026	9
Tabel 5. Prioritas Perbaikan Pelayanan	10
Tabel 6. Rencana Tindaklanjut pelaksanaan SKM.....	12
Tabel 7. Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat	13

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Kuesioner	15
Lampiran 2. Dokumentasi Pelayanan	16

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah sebagai pemberi layanan memiliki kewenangan yang luas untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat setempat. Namun demikian, keberhasilan pemerintah dalam menjalankan peranannya tersebut sangat ditentukan pada tingkat kualitas pelayanan publik yang disediakan. Salah satu upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan melakukan evaluasi untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan. Secara garis besar terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pelayanan publik, yaitu pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pemberi layanan, dan pendekatan yang melihat kinerja pelayanan dari perspektif pengguna layanan atau publik.

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, perlu dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

Data SKM dapat menjadi bahan penilaian dan evaluasi terhadap unsur pelayanan sehingga dapat menjadi perbaikan dan pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. SKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. SKM bertujuan untuk mengevaluasi kinerja unit pelayanan secara berkala

sebagai bahan menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Peraturan dan ketentuan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun SKM, yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.29/MEN/2008 Tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup;
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/PERMEN-KP/2020 Tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan dan/atau Inti Mutiara;
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

- i. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara KEP/63/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- j. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
- k. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- l. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah; dan
- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Yanblik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan pengukuran SKM adalah:

- a. Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja di unit pelayanan;
- b. Untuk mengetahui perbandingan antara harapan dan kebutuhan pengguna layanan dengan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik;
- c. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik; dan
- d. Melakukan evaluasi mutu kinerja unit pelayanan.

BAB II PENGUKURAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Pelaksanaan kegiatan pengukuran SKM dilaksanakan oleh BPBL Lombok terhadap para pengguna layanan. Petugas kemudian menyebarkan kuesioner online kepada para pengguna layanan sebagai umpan balik dalam penilaian pelayanan yang telah diberikan.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner melalui aplikasi SUSAN KKP milik PUSDATIN. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam kuesioner SKM, yaitu :

1. **Kesesuaian Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Kemudahan Prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Kesesuaian Biaya** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Kesesuaian Produk** : Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman

7. **Kemampuan Petugas** : Kemampuan adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Layanan Konsultasi** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Kualitas Isi Sarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan pada saat pengguna pelayanan telah melakukan pelayanan dengan membagikan link Tools SKM ke pengguna layanan. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri dan bisa jauh lebih mengutarakan pendapatnya.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Waktu pelaksanaan SKM pada Triwulan I dilakukan pada bulan Januari s.d Maret 2026.

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Persiapan	Januari 2026
2.	Pengumpulan Data	Januari – Maret 2026
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	Akhir Maret 2026
4.	Penyusun dan Pelaporan Hasil	Awal April 2026

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Kriteria untuk responden SKM adalah para pengguna layanan pada BPBL Lombok. Pengguna layanan didefinisikan sebagai orang yang sedang mendapat pelayanan teknis pada BPBL Lombok. Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survei pengguna layanan dengan jumlah responden pada Triwulan I Tahun 2026 adalah 27 (Dua puluh Tujuh) responden.

BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Jumlah responden Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk pelayanan publik lingkup BPBL Lombok pada periode Januari – Maret (Triwulan I) adalah sebanyak 27 (Dua puluh Tujuh) responden yang terdiri dari:

Tabel 1. Data Responden SKM

No.	Karakteristik	Indikator	Jumlah	Persentase
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	22	81,48%
		Perempuan	5	18,52%
2.	Pendidikan	SMP	0	0%
		SMA	3	11,11%
		Diploma	0	0%
		S1	24	88,89%
		S2	0	0%
		S3	0	0%
3.	Pekerjaan	PNS	2	7,41%
		Swasta	1	3,70%
		Pelajar	24	88,89%
4.	Usia	20-25	24	88,89%
		25-45	2	7,41%
		46-60	1	3,70

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik memuat 9 (sembilan) unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

- 1) Kesesuaian Persyaratan;
- 2) Kemudahan Prosedur;
- 3) Waktu Penyelesaian;
- 4) Kesesuaian Biaya/Tarif;
- 5) Kesesuaian Produk;
- 6) Kecepatan Respon;
- 7) Kemampuan Pelaksana;
- 8) Layanan Konsultasi;
- 9) Sarana.

Tabel 2. Kategorisasi Mutu Pelayanan

NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	Tidak Baik
1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang Baik
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kualitas 9 (sembilan) unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor SKM untuk periode Triwulan I tahun 2026 adalah **93,00**. Nilai tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan hasil Survei terhadap pengguna layanan, mutu pelayanan yang dilaksanakan oleh BPBL Lombok berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi SKM 81,26 – 100. Nilai rata – rata unsur setiap unsur pelayanan seperti terlihat pada Tabel 3. Nilai terendah dan tertinggi setiap unsur dapat dilihat pada Tabel 4.

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 9 (sembilan) Unsur Pelayanan

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Kesesuaian Persyaratan	3,74
U2	Kemudahan Prosedur	3,70
U3	Waktu Penyelesaian	3,70
U4	Kesesuaian Biaya/Tarif	3,59
U5	Kesesuaian Produk Layanan	3,74
U6	Kecepatan Respon	3,78
U7	Kemampuan Pelaksana	3,78
U8	Layanan Konsultasi	3,74
U9	Sarana	3,70

Tabel 4. Nilai IKM Triwulan IV Tahun 2025

TAHUN	IKM	TERTINGGI		TERENDAH	
		NRR	UNSUR PELAYANAN	NRR	UNSUR PELAYANAN
2026	93,00	3,78	Kecepatan Responden dan Kemampuan Pelaksana	3,59	Kesesuaian Biaya/Tarif

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata-Rata (NRR) tertinggi dimiliki oleh kategori unsur Kecepatan Responden dan Kemampuan Pelaksana dengan nilai NRR sebesar 3,78. Sementara itu, unsur dengan Nilai Rata-Rata (NRR) terendah adalah unsur Kesesuaian Biaya/Tarif dengan nilai NRR 3,59. Secara garis besar nilai semua unsur pelayanan sudah baik, hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat pengguna jasa layanan publik pada umumnya sudah baik. Semua unsur memiliki kisaran nilai di 3,26-4,00 yang berarti, semua pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

Tabel 5. Prioritas Perbaikan Pelayanan

No.	ASPEK PELAYANAN	URUTAN PRIORITAS
U4	Kesesuaian Biaya/Tarif	1
U2	Kemudahan Prosedur	2
U9	Sarana	3
U3	Waktu Penyelesaian	4
U1	Kesesuaian Persyaratan	5
U5	Kesesuaian Produk Layanan	6
U8	Layanan Konsultasi	7
U7	Kemampuan Pelaksana	8
U6	Kecepatan Respon	9

BAB IV ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisa Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Tiap Unsur Layanan

- a. Secara umum kualitas pelayanan pada Unit Pelayanan Publik, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dipersepsikan Sangat Baik (A) oleh masyarakat pengguna layanan publik. Hal ini terlihat dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh yaitu berkisar di antara 81,25-100. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh yaitu pada 9 unsur pelayanan adalah **93,00**;
- b. Unsur yang memiliki Nilai (NRR) **tertinggi** dimiliki oleh kategori yaitu unsur **Kecepatan Responden dan Kemampuan Pelaksana** dengan nilai yang sama yaitu **NRR 3,78**. Sementara itu, unsur dengan Nilai Rata-Rata (NRR) **terendah** adalah unsur **Kesesuaian Biaya/Tarif** dengan nilai **NRR 3,59**.
- c. Dari 9 unsur pelayanan, semuanya dinilai Sangat Baik (A). Unsur-unsur tersebut kualitas pelayanannya perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan agar tingkat kepuasan pengguna layanan merasa sangat puas.
- d. Setiap pesan dan masukan memberikan kesan yang positif dan membangun namun di beberapa unsur layanan terdapat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang memiliki nilai rendah sehingga perlunya dilakukan analisis ulang dan dilakukan evaluasi pada periode selanjutnya.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil SKM TW I tahun 2026, telah dilakukan analisis penyebab permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan publik maupun pengambilan kebijakan dan disusun rencana tindak lanjut perbaikan. Perlunya upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah ada, terutama dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas layanan terutama pada unsur pelayanan yang memiliki NRR rendah .

Tabel 6. Rencana Tindakan lanjut pelaksanaan SKM

No.	Prioritas Utama	Program /Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW I 2026	TW II 2026	TW III 2026	TW IV 2026	
1.	U4. Kesesuaian Biaya/Tarif	Melakukan penyampaian serta justifikasi kepada pengguna jasa terkait tarif yang berlaku pada layanan BPBL Lombok sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1 tahun 2025 tentang Tarif Volatil Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan		√			Tim Pelayanan BPBL Lombok
2.	U2. Kemudahan Prosedur	Melakukan Sosialisasi pada pengguna layanan terkait syarat /mekanisme pengajuan layanan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok		√			Tim Pelayanan BPBL Lombok
3.	U9. Sarana	Meningkatkan fasilitas layanan BPBL Lombok		√			Tim Pelayanan BPBL Lombok

4.3 Tren Nilai SKM

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) periode Triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 93,00 (Sembilan Puluh Tiga Koma Nol). Nilai ini mengalami kenaikan dibanding dengan periode sebelumnya (Triwulan IV tahun 2025) dengan nilai 91,17 (Sembilan Puluh Satu Koma Tujuh Belas). Dengan demikian kualitas pelayanan yang diberikan kepada pengguna layanan dapat dinikmati dengan baik namun perlunya

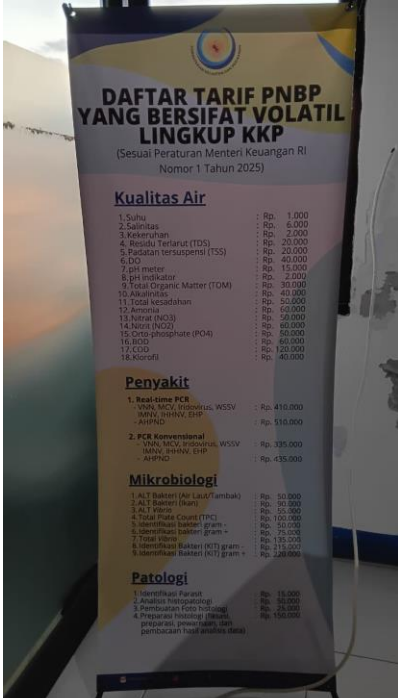
peningkatan pelayanan yang diberikan agar nilai survey kepuasan bisa lebih baik pada periode selanjutnya.

BAB V HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

Pada periode sebelumnya (Triwulan IV Tahun 2025), nilai SKM layanan 91,17 dengan kategori Sangat Baik (A). Pada saran dan masukan terdapat banyak pesan yang membangun namun pada Indeks Kepuasan Masyarakat dengan unsur layanan Kesesuaian Persyaratan mendapat nilai rata-rata terendah sehingga perlunya dilakukan sosialisasi kepada pengguna layanan terkait syarat/meknisme layanan Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok.

BUKTI TINDAK LANJUT SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PERIODE SEBELUMNYA

Tabel 7. Tindak Lanjut Survey Kepuasan Masyarakat

No.	Unsur Pelayanan	Rekomendasi	Tindak Lanjut Rekomendasi	Keterangan
1.	U4. Kesesuaian Biaya/Tarif	Memberikan sosialisasi kepada pengguna layanan terkait tarif yang berlaku di Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dengan memasang Banner tarif layanan di Ruang Pelayanan Publik	Banner Daftar Tarif Layanan BPBL Lombok 	Pemasangan banner tarif layanan yang berlaku di BPBL Lombok di ruang pelayanan publik.

DAFTAR TARIF PNBP YANG BERSIFAT VOLATIL LINGKUP KKP
(Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 1 Tahun 2025)

Asrama

1. Maleswara (sistem per hari) Rp. 40.000
2. Mahaswara (Periode per hari) Rp. 20.000

Ruang Rapat
(maksudnya maksimal)

1. Dengan AC (per hari) Rp. 100.000
2. Tanpa AC (per hari) Rp. 75.000

Ruang Aula
(maksudnya maksimal)

1. Dengan AC (per hari) Rp. 100.000

Kakap Putih

1. Tenggiri (per 1.000 butir) Rp. 6.000
2. Bawal (per ekor) Rp. 1.500
3. Bawal (per kg) Rp. 10.000
4. Kakap putih (per kg) Rp. 10.000
5. Kakap putih (per kg) Rp. 10.000

Bawal Bintang

1. Tenggiri (per 1.000 butir) Rp. 6.000
2. Bawal (per ekor) Rp. 1.500
3. Bawal (per kg) Rp. 10.000
4. Kakap putih (per kg) Rp. 10.000
5. Kakap putih (per kg) Rp. 10.000

Abalone

1. Bawal (per ekor) Rp. 1.500
2. Bawal (per kg) Rp. 10.000
3. Kakap putih (per kg) Rp. 10.000

Tiram Mutiara

1. Tenggiri (per 1.000 butir) Rp. 6.000
2. Bawal (per ekor) Rp. 1.500
3. Bawal (per kg) Rp. 10.000
4. Kakap putih (per kg) Rp. 10.000
5. Kakap putih (per kg) Rp. 10.000

Lobster

1. Tenggiri (per 1.000 butir) Rp. 6.000
2. Bawal (per ekor) Rp. 1.500
3. Bawal (per kg) Rp. 10.000
4. Kakap putih (per kg) Rp. 10.000
5. Kakap putih (per kg) Rp. 10.000

Wajan Hias

1. Tenggiri (per 1.000 butir) Rp. 6.000
2. Bawal (per ekor) Rp. 1.500
3. Bawal (per kg) Rp. 10.000
4. Kakap putih (per kg) Rp. 10.000
5. Kakap putih (per kg) Rp. 10.000

Rumput Laut

1. Tenggiri (per 1.000 butir) Rp. 6.000
2. Bawal (per ekor) Rp. 1.500
3. Bawal (per kg) Rp. 10.000
4. Kakap putih (per kg) Rp. 10.000
5. Kakap putih (per kg) Rp. 10.000

Plankton

1. Tenggiri (per 1.000 butir) Rp. 6.000
2. Bawal (per ekor) Rp. 1.500
3. Bawal (per kg) Rp. 10.000
4. Kakap putih (per kg) Rp. 10.000
5. Kakap putih (per kg) Rp. 10.000

U2.
Kemudahan
Prosedur

Dilakukan sosialisasi dengan menempelkan majalah dinding terkait mekanisme layanan yang ada di BPBL Lombok pada “Pojo Bahari BPBL Lombok” serta melakukan sosialisasi dengan pengguna layanan pada saat tatap muka maupun secara online (WhatsApp dan Intagram)

Sepanjang Triwulan I 2026.

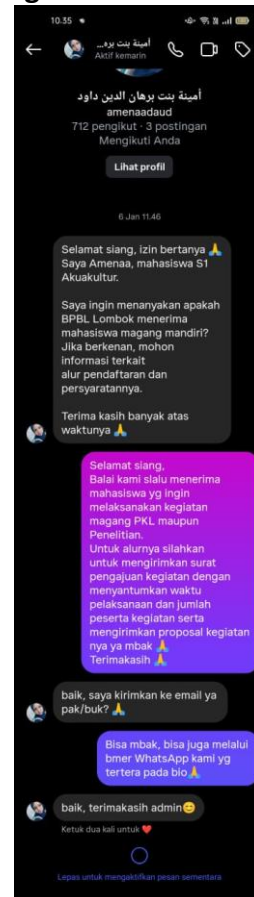
Majalah dinding pada “Pojo Bahari BPBL Lombok”.



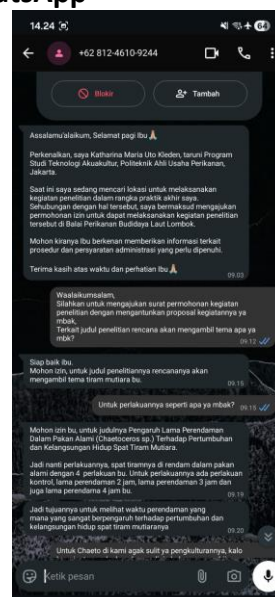
Pemasangan majalah dinding terkait mekanisme layanan yang berlaku di BPBL Lombok.

Sosialisasi kepada pengguna layanan pada saat konsultasi online.

Intagram



WhatsApp



BAB VI KESIMPULAN

Secara umum kualitas pelayanan pada Unit Pelayanan Publik, Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok dipersepsikan Sangat Baik (A) oleh masyarakat pengguna layanan publik. Hal ini terlihat dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diperoleh yaitu 93,00. Pada penilaian kali ini mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya yaitu 91,17.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Kuesioner

KUESIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)

PELAYANAN USAHA

Tanggal Survey:	Jam Survey :
-----------------	--------------

PROFIL

Usia:.....Tahun

Jenis Kelamin : ☐ L ☐ P

Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMU ☐ Diploma ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3

Pekerjaan : ☐ PNS ☐ TNI ☐ POLISI ☐ SWASTA ☐ WIRUSAHA

☐ Lainnya (sebutkan)

Jenis Layanan : ☐ Rekomendasi Pemasukan ☐ CBIB

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari Kode Huruf Sesuai Jawaban Responden)

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya a. Tidak Sesuai b. Kurang Sesuai c. Sesuai d. Sangat Sesuai	P*) 1 2 3 4	6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan a. Tidak Kompeten b. Kurang Kompeten c. Kompeten d. Sangat Kompeten	P*) 1 2 3 4
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini a. Tidak Mudah b. Kurang Mudah c. Mudah d. Sangat Mudah	 1 2 3 4	7. Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan a. Tidak sopan dan ramah b. Kurang sopan dan ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah	 1 2 3 4
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan a. Tidak Cepat b. Kurang Cepat c. Cepat d. Sangat Cepat	 1 2 3 4	8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana a. Buruk b. Cukup c. Baik d. Sangat Baik	 1 2 3 4
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan a. Sangat Mahal b. Cukup Mahal c. Murah d. Gratis	 1 2 3 4	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan a. Tidak ada b. Ada tapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik	 1 2 3 4
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan a. Tidak Sesuai b. Kurang Sesuai c. Sesuai d. Sangat Sesuai			

Lampiran 2. Dokumentasi Pelayanan

Dokumentasi Layanan Kunjungan





Dokumentasi Layanan Magang, PKL, dan Penelitian





Dokumentasi Kegiatan Bantuan Benih



